



**ANALISIS KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DI
SEKTOR ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DITINJAU DARI
TRIMS AGREEMENT DAN SCM AGREEMENT**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

HAMDANI AMRIANSYAH

NIM 11000120120060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS KEBLIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DI
SEKTOR ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DITINJAU DARI TRIMS
AGREEMENT DAN SCM AGREEMENT**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Progam Sarjana Hukum

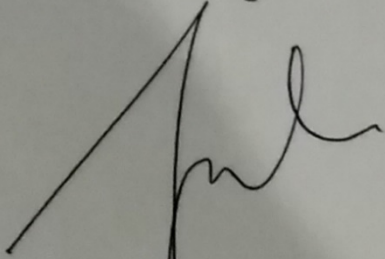
Oleh:

HAMDANI AMRIANSYAH

NIM 11000120120060

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan setuju untuk diperbanyak

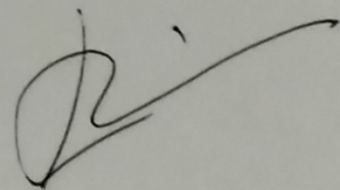
Pembimbing I



Prof. Dr. FX. Djoko Priyono, S.H., M.Hum.

NIP 196202241987031001

Pembimbing II



Dr. Darminto Hartono Paulus, S.H., LL.M

NIP 196008011989021001

HALAMAN PENGUJIAN

**ANALISIS KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DI
SEKTOR ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DITINJAU DARI TRIMS
AGREEMENT DAN SCM AGREEMENT**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

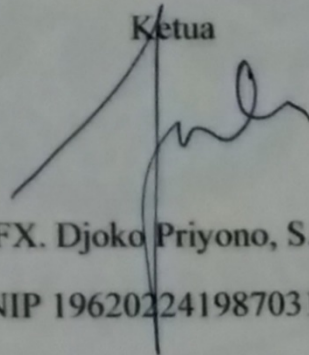
HAMDANI AMRIANSYAH

NIM 11000120120060

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji

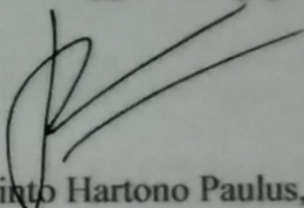
Ketua



Prof Dr. FX. Djoko Priyono, S.H., M.Hum.

NIP 196202241987031001

Anggota Penguji I



Dr. Darminto Hartono Paulus, S.H., LL.M.
NIP 196008011989021001

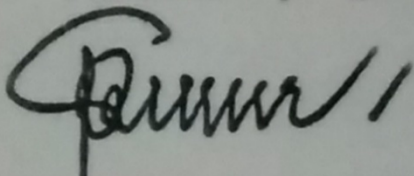
Anggota Penguji II



Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum.
NIP 196402091988032001

Mengesahkan:

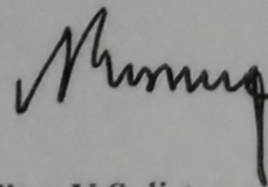
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H
NIP 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Mei 2024



Hamdani Amriansyah

11000120120060

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”

- HR Tirmidzi

Persembahan

Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta: Bapak, Ibu, Kakak, serta keluarga besar yang telah memberi semangat, bimbingan, kasih sayang, dan doa yang tiada henti pada setiap hal yang saya lakukan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala ramhat dan nikmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “Analisis Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri di Sektor Energi Baru dan Terbarukan Ditinjau Dari TRIMs Agreement Dan SCM Agreement”. Penulis berharap karya ini dapat memberi manfaat, pengetahuan, dan pemahaman sebagai sumbangan pemikiran kepada setiap pihak yang membacanya. terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, serta perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

Terselesaiakannya penulisan hukum ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi Penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. FX. Djoko Priyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Darminto Hartono Paulus, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing II yang berkenan memberi bimbingan kepada Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada pihak-pihak yang membantu penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yaitu:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., M.L.I., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional;
5. Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang membantu penulis selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan;
7. Bapak, Ibu, dan Kakak penulis yang selalu memberikan dukungan dan memanjatkan doa untuk penulis;
8. Teman-teman penulis yang memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir;
9. Teman-teman penulis di organisasi Kelompok Studi Hukum Islam, Pseudorechtspraak, dan Ikatan Mahasiswa Hukum Internasional yang mendorong penulis untuk berkembang;
10. Teman-teman Delegasi, Manajer, dan Official Team NMCC Bulaksumur V 2022.
11. Teman-teman Tim KKN Tematik Desa Maribaya 2023;
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2020.
13. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu,

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir yang Penulis susun masih belum mencapai tahap sempurna. Penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak

demi perkembangan ilmu dan pengetahuan, terutama perkembangan ilmu hukum.

Semarang, 22 Mei 2024

Hamdani Amriansyah

11000120120060

ABSTRAK

Globalisasi ekonomi menimbulkan hubungan saling ketergantungan antarnegara dalam sektor finansial, perdagangan, dan produksi. Hal tersebut didorong dengan berlakunya *The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. TRIMs Agreement dan SCM Agreement merupakan perjanjian di bawah GATT yang mengatur perdagangan Internasional. Pasal 2 ayat (1) TRIMs Agreement melarang negara anggota mendiskriminasi perusahaan penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri. Sedangkan, dalam Pasal 3.1. SCM Agreement, termuat larangan bagi negara anggota WTO untuk memberikan subsidi dengan persyaratan penggunaan komponen lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada sektor Energi Baru dan Terbarukan terhadap *Article 2.1 Agreement on Trade Related Investment Measures* dan *Article 3.1 Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian ini mencocokkan kesesuaian antara kebijakan hukum nasional dengan hukum internasional. Data diperoleh dari kajian pustaka melalui perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder. Seluruh data kemudian diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penetapan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada kegiatan usaha pembangkit listrik Energi Baru dan Terbarukan melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 54/M-IND/PER/3/2022 bertentangan dengan *Article 2.1 TRIMs Agreement* tentang Persyaratan Komponen Lokal. Kebijakan insentif pajak penghasilan dengan syarat komponen lokal melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2015 bertentangan dengan *Article 3.1 SCM Agreement* tentang Subsidi dengan Syarat Komponen Lokal.

Kata Kunci : TKDN, insentif fiskal, energi baru dan terbarukan, GATT, SCM Agreement, TRIMs Agreement.

ABSTRACT

Economic globalization creates interdependence between countries in the financial, trade, and production sectors. This is driven by the entry into force of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Article 2 (1) of the TRIMs Agreement prohibits WTO member states from discriminating against foreign investment with national companies. While in Article 3.1. of the SCM Agreements, it is prohibited for WTO member states to grant subsidies with the conditions of using local components. This study aims to identify and examine the conformity of the local content policies on renewable energy sectors with Article 2.1 Agreement on Trade Related Investment Measures and Article 3.1 Agreements on Subsidies and Countervailing Measures. This legal research is conducted as normative study. This research aim to review the consistency of national policies with international law. The data are obtained by performing library research through international treaties, regulations, and secondary legal materials. All datas are then presented in descriptive terms. Based on the results of the research, it was found that the enactment local content policy in renewable energy sector through Ministry of Industry Regulation Number 54/M-IND/PER/3/2022 is contrary to Article 2.1. of the TRIMs Agreement about Local Content Requirements, while local content subsidy policy through Ministry of Energy and Mineral Resources Number 16 of 2015 is contrary to Article 3.1. (b) of the SCM Agreement about Local Content Subsidy.

Keywords : local content policy, fiscal incentives, GATT, renewable energy, SCM Agreement, TRIMs Agreement.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Kerangka Pemikiran.....	12
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Metode Penelitian.....	16
1. Metode Pendekatan	16
2. Spesifikasi Penelitian	17
3. Sumber dan Jenis Data	18
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisis Data	20
G. Sistematika Penulisan	21
H. Orisinalitas Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. GATT dan Investasi Asing.....	26
B. Praktik Perdagangan Tidak Adil	31
C. Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri.....	33
D. Energi Baru dan Terbarukan	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44

A. Kesesuaian antara Peraturan Menteri Perindustrian No. 54/M-IND/PER/3/2012 jo. Peraturan Menteri Perindustrian No. 23 Tahun 2023 dengan Pasal 2.1. TRIMs Agreement	44
1. Kebijakan TKDN pada Permenperin 54/2012 jo. Permenperin 23/2023 berlaku terhadap barang (<i>goods</i>)	45
2. Kebijakan TKDN pada Permenperin 54/2012 jo. Permenperin 23/2023 adalah kebijakan investasi (<i>investment measures</i>)	46
3. Kebijakan TKDN pada Permenperin 54/2012 jo. Permenperin 23/2023 berkaitan dengan perdagangan (<i>trade-related</i>).....	51
4. Kebijakan TKDN akan membawa keuntungan bagi pihak-pihak tertentu	54
5. Kebijakan TKDN mensyaratkan penggunaan produk dalam negeri tertentu, yang ditentukan dalam volume atau proporsi atas nilai produksi lokal	57
6. Kebijakan TKDN di Sektor Energi Baru dan Terbarukan Tidak Dikecualikan dari GATT	59
B. Kesesuaian antara Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2015 dengan Pasal 3.1 SCM Agreement.....	64
1. Terdapat pendanaan atau bantuan finansial.....	68
2. Pendanaan tersebut dilakukan oleh pemerintah atau badan publik.....	69
3. Terdapat keuntungan yang diperoleh oleh pihak yang mentaati kebijakan tersebut	70
4. Subsidi spesifik untuk perusahaan tertentu, industri tertentu, kelompok perusahaan tertentu atau kelompok industri tertentu (<i>specificity</i>)	71
5. Kebijakan <i>local content subsidy</i> pada sektor energi baru dan terbarukan tidak dikecualikan oleh SCM Agreement.....	74
6. Kebijakan <i>local content subsidy</i> pada sektor energi baru dan terbarukan tidak dikecualikan oleh Pasal XVIII GATT	75
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	